

Performa Kekuasaan dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Deskriptif di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto)

Muhammad Budi Santosa

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perumusan kebijakan revitalisasi pasar di kota Mojokerto, serta performa kekuasaan yang terjadi dalam revitalisasi pasar. Penulis mengambil daerah penelitian Pasar Tradisional Tanjung Anyar di Kota Mojokerto dikarenakan memiliki beberapa potensi meliputi jumlah pelanggan tetap yang semakin meningkat dan dikenal meluas. Oleh karenanya, dalam kebijakan revitalisasi pasar menganalisis interaksi aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, mengetahui keterlibatan pedagang pasar dalam perumusan kebijakan, dan mengetahui performa kekuasaan dalam kebijakan tersebut akan disoroti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara Pemerintah Kota dan DPRD pada proses perumusan kebijakan revitalisasi pasar tradisional dimana terjalin kerjasama diantara pihak yang terlibat. Partisipasi dari pedagang pasar dalam bentuk aspirasi membantu terselenggaranya proses perumusan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Kota menjalankan kekuasaannya dengan menekankan pendekatan kepada pedagang pasar, dimana sosialisasi dilakukan Pemerintah Kota untuk menghindari penolakan dari pedagang pasar. Dalam William N. Dunn menyatakan kebijakan publik merupakan suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kata Kunci: Performa Kekuasaan, Formulasi Kebijakan, Revitalisasi Pasar

Pendahuluan

Keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di dalam masyarakat kita. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, akan tetapi sudah merambah sampai ke kota-kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman. Citra pasar tradisional yang kurang baik itu haruslah mendapat penanganan yang serius dari pemerintah. Pembenahan pasar tradisional untuk menjadi tempat perbelanjaan yang nyaman dan menarik dan bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat yang harus di upayakan pemerintah sebagai rasa tanggung jawab kepada publik. Pemerintah harus mendorong pasar tradisional untuk melakukan perubahan pelayanan layaknya pasar modern yang harus dikembangkan oleh pasar tradisional agar tidak tersingkir dalam perebutan konsumen. Hadirnya pasar-pasar modern yang makin menjamur tersebut akan menggeser kegiatan ekonomi rakyat yang bergerak di pasar-pasar tradisional.

Pemerintah daerah perlu turut serta memprogramkan revitalisasi pasar tradisional di wilayahnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan pasar modern. Pasar tradisional harus direvitalisasi supaya jangan tergerus oleh kehadiran pasar modern. Pasar tradisional memiliki peran sangat besar bagi perekonomian masyarakat sekitar sehingga keberadaannya harus dijaga. Pasar menjadi tempat dimana tersedia bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat. Pasar yang aman dan nyaman akan menarik lebih banyak pengunjung sehingga meningkatkan kegiatan perdagangan. Disadari atau tidak, persepsi masyarakat terhadap pasar tradisional adalah kumuh, semrawut, becek, kotor dan minimnya fasilitas seperti terbatasnya tempat parkir, tempat sampah yang bau dan kotor, lorong yang sempit dan sebagainya. Pasar tradisional pada umumnya masih menggunakan penerangan seadanya sehingga terkesan redup dan kusam, suasana yang tidak menarik orang untuk datang, memilih, dan membeli dagangan pada malam hari. Lingkungan pasar tradisional pada umumnya juga kurang terawat. Hampir setiap sudutnya ditempati pedagang. Tidak ada ruang terbuka hijau yang cukup melegakan. Area yang sempit ditambah lagi dengan kondisi yang kotor benar-benar melengkapi kesan tradisional. Seakan-akan yang tradisional tersebut harus seperti itu kondisinya.

Pembangunan infrastruktur atas pasar tradisional menjadi belum cukup, tetapi butuh dirawat dengan desain pengelolaan yang baik. Hal ini untuk mengingatkan bahwa di tengah menggebu-gebunya pemerintah merevitalisasi bangunan pasar, perlu juga diimbangi adanya pelatihan manajemen pengelolaan pasar, penyusunan model pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan pasar. Revitalisasi pasar tradisional berarti mensinergikan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh pasar tradisional dengan mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif, terintegrasi dan holistik sehingga mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap mempertahankan kekhasan maupun keunggulan yang dimiliki pasar tradisional tersebut. Revitalisasi pasar tradisional seharusnya dapat dilakukan dengan menata dan membenahi pasar tradisional, dimana kelemahan-kelemahan pada pasar tradisional yang menyebabkan penurunan daya saing pasar tradisional sendiri harus segera dibenahi. Pasar tradisional harus maju bersamaan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Revitalisasi pasar tradisional membutuhkan kebijakan yang berpihak, baik pemerintah maupun seluruh stakeholder yang terkait. Adapun kebijakan-kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka merevitalisasi pasar tradisional. Dimana mampu merubah wajah pasar tradisional agar bisa lebih higienis, lebih nyaman dan lebih teratur.

Pembenahan pasar tradisional ini hendaknya mengedepankan kepentingan para pedagangnya dan konsumen. Diperlukan koordinasi dan kerjasama yang erat antar semua pihak agar tidak terjadi kerancuan dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Regulasi pemberdayaan pasar tradisional hendaknya diupayakan dengan memfasilitasi pedagang pasar tradisional agar mendapatkan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan publik yang dilahirkan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat luas dan hanya demi kepentingan segelintir orang saja. Jika pemerintah tidak berpihak kepada pasar tradisional maka mereka akan semakin termarginalkan dan membiarkan keberadaan pasar tradisional semakin terpinggirkan dan mati oleh para pelaku usaha besar yang lebih kuat. Pada dasarnya pasar tradisional memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan pasar modern, misalnya proses jual beli di pasar modern tidak ada tawar-menawar harga, sedangkan belanja di pasar tradisional tidak ada ketentuan harga atau dapat ditawar.

Revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang sangat penting dikarenakan manfaatnya itu sendiri langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hal utama dalam menjalankan proses revitalisasi pasar tradisional adalah kebijakan pemerintah daerah yang harus didukung juga oleh DPRD setempat. Dalam meningkatkan peran pasar tradisional pada proses berjalannya ekonomi masyarakat bawah perlu adanya keseriusan tentang kebutuhan riil masyarakat pada daerah tersebut. Sehingga solusi dapat tercipta dikarenakan benar-benar bisa untuk memenuhi perilaku konsumen dan tetap mempertimbangkan kemampuan para pedagang pasar. Masalah infrastruktur ditengarai masih menjadi permasalahan yang dinilai serius di pasar tradisional ialah dimana bangunan pasar yang kondisinya sudah lama, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang keberadaannya kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Renovasi dan inovasi menjadi kunci untuk memunculkan kembali jati diri pasar tradisional jika tidak mau menjadi sejarah dan terlupakan. Penataan dan revitalisasi pasar tradisional, menjadi upaya dimana agar pasar tradisional tidak terkesan kumuh, serta masyarakat lebih tertarik pada pasar tradisional. Selain hal tersebut, dalam menjalankan kebijakan revitalisasi terhadap pasar-pasar tradisional harus tepat sasaran. Dimana agar kecenderungan untuk merugikan pedagang pasar tradisional bisa dihilangkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, bagaimana keterlibatan pedagang pasar dalam perumusan kebijakan, dan bagaimana performa kekuasaan dalam kebijakan tersebut akan disoroti dalam penelitian ini. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah lembaga. Lembaga yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah DPRD Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini SKPD yang terkait dalam masalah penelitian ini. Subyek penelitian dalam penelitian adalah ibu Harlistyati selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, bapak Sonny Basoeki R selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, ibu Sulimah selaku KTU UPT Pasar Tanjung Anyar, bapak Budi, ibu Lis, ibu Siti, dan ibu Ulah selaku Pedagang Pasar Tanjung Anyar. Lokasi penelitian mengambil tempat di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait, dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Teori William N. Dunn

Kebijakan publik merupakan proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas. Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan. William N. Dunn menyatakan kebijakan publik adalah

suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum (Naihasy, 2006 : 18).

Pihak yang Terlibat Dalam Formulasi Kebijakan

Pihak yang memiliki kewenangan pembuatan kebijakan dan berada pada struktur pemerintahan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam formulasi kebijakan revitalisasi pasar, yakni DPRD Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto, dan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan.

Peran Pihak yang Terlibat Dalam Formulasi Kebijakan

DPRD Kota Mojokerto menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi-fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam perumusan kebijakan. Menyiapkan anggaran terkait dengan perencanaan revitalisasi pasar. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dimana tertuang dalam tugas pokok Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan Walikota. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menaungi pasar di Kota Mojokerto melakukan pembahasan kebijakan bersama dengan DPRD dan Pemerintah Kota Mojokerto. Sebagai dinas yang ditunjuk dalam pelaksanaan revitalisasi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan pedagang dan melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar, serta membentuk tim dalam pelaksanaan revitalisasi dengan menunjuk Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dari segi fisik bangunan.

Interaksi Dalam Formulasi Kebijakan Revitalisasi Pasar

Dalam kebijakan revitalisasi pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, proses interaksi berbentuk asosiatif. Interaksi dalam proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan DPRD Kota Mojokerto memiliki keinginan yang sama dimana Kota Mojokerto memiliki pasar tradisional yang representative, nyaman dan bersih tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Interaksi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan DPRD untuk membahas dan menetapkan kebijakan tidak terlepas dari aspirasi masyarakat. Pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk merumuskan kebijakan. Dalam proses penjaringan aspirasi tersebut diharapkan partisipasi masyarakat dalam bentuk saran dan pendapatnya sebagai masukan yang bermanfaat. Pedagang pasar sendiri menginginkan pasar yang bersih dan tertata dengan rapi dimana akan menambah minat bagi pembeli untuk datang berbelanja ke pasar. Keinginan baik dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan DPRD diutarakan masing-masing melalui rapat bersama untuk mencapai satu visi yang sama.

Dalam rapat dan pembahasan yang berlangsung dan bersama untuk mencapai persamaan satu persepsi dan keinginan dalam pemberdayaan pasar tradisional. Ide revitalisasi pasar yang kemudian dimunculkan oleh DPRD Kota Mojokerto. Kebijakan revitalisasi sendiri dipilih lewat berbagai pertimbangan, dimana tempat yang di rasa strategis berada di jantung kota serta dianggap lebih tepat dengan perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Mojokerto. Pengkajian lebih dalam dan pertimbangan dibutuhkan untuk menyempurnakan tujuan yang diinginkan dari adanya kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Selain itu hasil dari pembahasan kebijakan yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan DPRD tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dimana akan dilakukan revitalisasi pasar. Pelaksanaan kebijakan revitalisasi diserahkan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan kebijakan, dilakukan kajian revitalisasi pasar oleh Balitbang Kota Mojokerto untuk kemudian setelah selesai dilakukan pengkajian diserahkan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Sementara untuk pembangunan fisik diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Keterlibatan Pedagang Pasar dalam Formulasi Kebijakan Revitalisasi Pasar

Sebagian besar pedagang senang dengan adanya kebijakan revitalisasi, dengan harapan pasar tradisional akan menjadi lebih baik dan menghilangkan kesan negatif. Aspirasi pedagang pasar disampaikan kepada UPT pasar untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk kemudian ditampung. Meski tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan, akan tetapi partisipasi dari para pedagang dalam bentuk aspirasi membantu terselenggaranya proses perumusan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Pedagang pasar mendapat sosialisasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengenai revitalisasi pasar. Proses perumusan kebijakan revitalisasi pasar dengan demikian melibatkan para pedagang pasar dalam prosesnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui UPT Pasar untuk memberikan pemahaman kepada pedagang pasar mengenai pelaksanaan revitalisasi pasar. Dan keterbukaan dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang mana dengan adanya sosialisasi kepada para pedagang pasar memberi gambaran dan kejelasan mengenai rencana revitalisasi pasar terbesar di Kota Mojokerto tersebut.

Performa Kekuasaan dalam Kebijakan Revitalisasi Pasar

Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar terbesar di Kota Mojokerto memiliki beberapa potensi meliputi jumlah pelanggan tetap yang semakin meningkat dan dikenal meluas tidak hanya dari Kota Mojokerto sendiri, tapi juga di Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan Kota Mojokerto. Beberapa pedagang pasar mengharapkan adanya perubahan pada tempat mereka berdagang. Masukan positif tersebut ditampung untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan. Pedagang pasar bisa mengungkapkan keinginannya tersebut untuk disampaikan kepada UPT pasar dan diteruskan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan.

Aspirasi ditampung untuk selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan oleh Pemerintah Kota bersama dengan DPRD. DPRD Kota Mojokerto menjalankan peran

sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi-fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam perumusan kebijakan. Menyiapkan anggaran terkait dengan perencanaan revitalisasi pasar. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dimana tertuang dalam tugas pokok Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan. Kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perumusan terlihat saat adanya rapat pembahasan bersama antara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan DPRD. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan DPRD Kota Mojokerto memiliki keinginan yang sama. Dimana memberdayakan pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Mojokerto, dalam hal ini Pasar Tanjung Anyar. Perumusan kebijakan terbentuk manakala melalui proses rapat dan pembahasan Pemerintah Kota bersama dengan DPRD Kota Mojokerto.

Pemerintah Kota dalam hal ini menggunakan kewenangannya dengan mengeluarkan kebijakan yang mana memberdayakan pasar tradisional. Dimana kebijakan yang dihasilkan yakni, merevitalisasi Pasar Tanjung Anyar. Kebijakan tersebut untuk kemudian disosialisasikan kepada pedagang pasar secara bertahap. Dimana pemerintah kota dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang mensosialisasikan hasil kebijakan tersebut kepada para pedagang. Sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada pedagang pasar dimana kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pedagang pasar. Masyarakat dan pedagang pasar mendukung kebijakan tersebut dimana merupakan harapan dan manfaatnya dirasakan sendiri oleh pedagang pasar.

Dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional, Pemerintah Kota dalam menjalankan kekuasaannya menggunakan cara persuasif. Untuk meminimalisir permasalahan dilakukan sosialisasi kepada pedagang pasar terlebih dahulu khususnya kepada para pedagang tentang rencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota. Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar secara bertahap. Program sosialisasi yang dirancang tidak hanya memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan, namun juga model pengembangan revitalisasi Pasar Tanjung Anyar. Pemerintah Kota melakukan cara persuasif dalam melakukan pendekatan terhadap revitalisasi pasar, dimana sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang pasar mengenai kebijakan revitalisasi pasar.

Teori William N. Dunn Dalam Formulasi Kebijakan Revitalisasi Pasar

Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan. William N. Dunn menyatakan kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum (Naihasy, 2006 : 18).

Dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional tanjung anyar, adapun pedagang pasar menginginkan adanya pembenahan fasilitas yang terdapat dalam pasar. Pedagang pasar mengaharap dengan adanya pembenahan terhadap pasar pembeli akan semakin

nyaman dan akan berdatangan ke pasar. Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini menginginkan tidak adanya pedagang kaki lima lagi yang sering kali dapat ditemui menghiasi sudut-sudut luar dari pasar tanjung anyar. Sementara itu baik Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan DPRD Kota Mojokerto memiliki keinginan yang sama. Dimana keinginan dari kedua pihak yakni memberdayakan pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Mojokerto, dalam hal ini pasar tanjung anyar.

Dengan keinginan dari pedagang pasar yang mana ingin adanya pembenahan terhadap infrastruktur pasar tanjung anyar. Aspirasi dari pedagang kemudian disampaikan melalui UPT pasar untuk kemudian diteruskan ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang berada pada tingkatan atasnya. Input yang di dapat kemudian diproses yang mana terjadi interaksi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan jajaran dinas terkait melalui rapat-rapat. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan untuk melakukan pemberdayaan pasar tradisional dan bersama dengan DPRD selaku mitra kerja dilakukan rapat pembahasan bersama. Dalam rapat pembahasan bersama antara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama DPRD, ide untuk merevitalisasi pasar kemudian dimunculkan oleh pihak DPRD. Kebijakan revitalisasi diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan dianggap lebih tepat dengan perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Mojokerto yang ada. Komunikasi dijalin intensif diantara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan DPRD dimana agar menyatu menjadi satu visi.

Setelah kebijakan revitalisasi dianggap sesuai dan disetujui, untuk pelaksanaan revitalisasi pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas untuk melakukan pendataan pedagang pasar dan mensosialisasikan kepada pedagang serta masyarakat sekitar pasar mengenai pelaksanaan revitalisasi. Pendataan pedagang dilakukan untuk menyiapkan tempat penampungan sementara bagi pedagang pasar saat penyelesaian pekerjaan revitalisasi dilaksanakan. Kajian terhadap revitalisasi didapatkan dari Balitbang setelah dilakukan penelitian sebelumnya. Terkait pembangunan fisik bangunan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Sementara dana yang dianggarkan dan disetujui DPRD dengan Pemerintah Kota terdapat di Bappeko.

Pemerintah Kota dalam menjalankan kekuasaannya dengan melakukan pendekatan terhadap pedagang pasar melalui sosialisasi. Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang mensosialisasikan hasil kebijakan tersebut kepada para pedagang. Sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada pedagang pasar dimana kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pedagang pasar. Sosialisasi untuk meminimalisir permasalahan kepada pedagang pasar terlebih dahulu khususnya kepada para pedagang tentang rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Program sosialisasi yang dirancang tidak hanya memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan, namun juga model pengembangan revitalisasi Pasar Tanjung Anyar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan dan hasil analisa berdasarkan teori maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, dalam kebijakan revitalisasi pasar

Tanjung Anyar Kota Mojokerto proses interaksi berbentuk asosiatif. Interaksi dalam proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan DPRD Kota Mojokerto memiliki keinginan yang sama dimana Kota Mojokerto memiliki pasar tradisional yang representative, nyaman dan bersih tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Interaksi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan DPRD untuk membahas dan menetapkan kebijakan tidak terlepas dari aspirasi masyarakat. Dimana tujuan dilakukannya penjarangan aspirasi masyarakat tersebut adalah upaya untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dilaksanakan rapat pembahasan dengan DPRD mengenai usaha pemberdayaan pasar. Interaksi terjadi antara Pemerintah Kota dengan DPRD, dimana menyamakan persepsi masing-masing dan menjadi satu visi yang sesuai. Interaksi dalam kebijakan revitalisasi terjalin melalui rapat-rapat dan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, dalam kebijakan revitalisasi mencerminkan proses-proses interaksi dalam bentuk kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat.

Kedua, dalam proses perumusan kebijakan revitalisasi pasar melibatkan pedagang pasar dalam prosesnya. Keinginan dari para pedagang disampaikan melalui pengelola pasar, nantinya akan disampaikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang mana pasar sendiri berada dalam lingkungannya. Keterlibatan pedagang pasar dalam proses perumusan kebijakan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Pedagang pasar mendapat sosialisasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengenai revitalisasi pasar.

Ketiga, Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan. Dimana kebijakan yang dihasilkan yakni, merevitalisasi Pasar Tanjung Anyar. Dalam hal ini Pemerintah Kota menjalankan kekuasaannya dengan cara persuasif, dimana kebijakan revitalisasi dapat memenuhi keinginan pedagang pasar tetapi di lain sisi Pemerintah Kota mencapai keinginannya untuk memindah pedagang yang berada di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Untuk meminimalisir permasalahan dilakukan sosialisasi kepada pedagang pasar terlebih dahulu khususnya kepada para pedagang tentang rencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota. Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar secara bertahap. Program sosialisasi yang dirancang tidak hanya memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan, namun juga model pengembangan revitalisasi Pasar Tanjung Anyar.

Daftar Pustaka

Alokasi Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Rp 740 Miliar (2012) [Diakses 5 juni 2013].
<http://www.jpnn.com/read/2012/12/30/152356/Alokasi-Dana-Revitalisasi-Pasar-Tradisional-Rp-740-Miliar->.

Budiardjo, Miriam. (2009) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media.

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Madani, Muhlis. (2011) Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, M.B. dan A.M Huberman. (1992) Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Naihasy, Syahrin. (2006) Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta: Midi Pustaka.
- Rachbini, Didik J. (2004) Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Jakarta : Granit.
- Ratusan Pasar Tradisional Akan Direvitalisasi (2011) [Diakses 5 Juni 2013]. http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3371:ratusan-pasar-tradisional-akan-direvitalisasi&catid=5:ekbis&Itemid=77.
- Sinergitas Pasar Tradisional dengan Pasar Modern (2011) [Diakses 5 Juni 2013]. <http://balitbangkotamojokerto.blogspot.com/2011/09/sinergitas-pasar-tradisional-dgn-pasar.html>.
- Subarsono, AG. (2009) Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Sadono. (1981) Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta : Borta Gorat.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004) Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
- Widodo, Joko. (2009) Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.